

## Dampak *Protracted Conflict* Terhadap Keamanan Perempuan Di Sudan Selatan

Ni Kadek Yunita Ardiantari<sup>1)</sup>, I Made Anom Wiranata<sup>2)</sup>, Putu Titah Kawitri Resen<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Hubungan Internasional/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Universitas Udayana.

### Abstrak

Konflik berkepanjangan di Sudan Selatan telah menimbulkan dampak multidimensi yang signifikan terhadap aspek kehidupan masyarakat, khususnya perempuan. Kelompok ini menjadi sangat rentan terhadap berbagai dampak yang muncul, seperti kekerasan fisik, pelanggaran hak asasi manusia, kehilangan akses terhadap sumber daya dasar, serta gangguan layanan kesehatan dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak *protracted conflict* di Sudan Selatan terhadap keamanan perempuan melalui pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Dalam studi ini, digunakan kerangka konsep *Human Security* untuk menganalisis dampak konflik berkepanjangan terhadap keamanan manusia dari berbagai dimensi serta konsep *Gender Based-Violence* untuk melihat kerentanan perempuan sebagai kelompok yang paling terdampak. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian berbasis daring, kemudian dianalisis secara sistematis dengan teknik kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak *protracted conflict* di Sudan Selatan tercermin pada meningkatnya kerentanan perempuan dalam berbagai aspek keamanan. Pada dimensi keamanan komunitas perempuan kehilangan dukungan sosial dari keluarga dan komunitas, yang pada gilirannya meningkatkan isolasi sosial dan kerentanan mereka terhadap eksploitasi serta kekerasan. Dalam bidang ekonomi dan pangan, perempuan kehilangan mata pencaharian dan akses sumber daya, sehingga mengalami beban ganda dan kelaparan ekstrem. Dalam aspek kesehatan, minimnya layanan medis dan ketersediaan obat memperburuk kondisi kerentanan perempuan. Kondisi ini diperburuk oleh kerusakan lingkungan dan keterbatasan akses air bersih yang semakin menekan perempuan. Sementara itu, instabilitas politik dan keberlangsungan struktur patriarki semakin membatasi partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga memperlebar kesenjangan dalam ranah politik.

**Kata-kunci** : Dampak Multidimensi, Keamanan perempuan, Kerentanan Perempuan, *Protracted Conflict*, Sudan Selatan

### Abstract

*The protracted conflict in South Sudan has generated significant multidimensional impacts on various aspects of societal life, particularly for women. This group has become highly vulnerable to a range of consequences, including physical violence, human rights violations, loss of access to basic resources, as well as disruptions to health services and the environment. This study aims to analyze the impact of protracted conflict in South*

*Sudan on women's security through a descriptive-analytical qualitative approach. This research employs the Human Security framework to examine the effects of prolonged conflict on multiple dimensions of human security, alongside the concept of Gender-Based Violence to highlight women's vulnerability as the most affected group. Data were collected through a literature review and online-based research, then systematically analyzed using data condensation, data display, and conclusion-drawing techniques. The findings indicate that the impacts of protracted conflict in South Sudan are reflected in the increasing vulnerability of women across various security dimensions. In the dimension of community security, women have lost social support from family and community networks, which in turn intensifies social isolation and heightens their vulnerability to exploitation and violence. In the economic and food security dimensions, women have lost livelihoods and access to essential resources, resulting in a double burden and extreme hunger. In terms of health security, limited medical services and shortages of essential medicines further exacerbate women's vulnerability. These conditions are compounded by environmental degradation and restricted access to clean water, which place additional pressure on women. Meanwhile, political instability and the persistence of patriarchal structures continue to limit women's participation in decision-making processes, thereby widening gender gaps in the political sphere.*

**Keywords :** *Multidimensional Impact, Women's Security, Women's Vulnerability, Protracted Conflict, South Sudan*

**Kontak Penulis**

Ni Kadek Yunita Ardiantari

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Jl. PB. Sudirman, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali 80234

Telp: 0000 Fax: 0000

E-mail : yunitaardiantari005@student.unud.ac.id

## PENDAHULUAN

Sudan Selatan merupakan salah satu kasus konflik dalam hubungan internasional yang merepresentasikan karakteristik *protracted conflict*, yaitu konflik dengan durasi yang panjang, intensitas kekerasan yang tinggi, serta keterlibatan aktor-aktor bersenjata yang kompleks. Sejak merdeka pada tahun 2011, Sudan Selatan terus bergulat dengan *protracted conflict* yang berakar dari persaingan elit politik dan ketegangan antar-etnis. Alih-alih menikmati perdamaian, negara ini justru terjebak dalam siklus kekerasan yang berkepanjangan, yang tidak hanya merenggut

secara drastis, dengan puncak tertinggi tercatat pada tahun 2014, ketika jumlah korban mencapai lebih dari 1,6 juta jiwa. Meskipun setelah periode tersebut terjadi penurunan, grafik menunjukkan bahwa korban jiwa tidak pernah benar-benar hilang. Pada rentang 2015-2018, jumlah korban tetap berada pada tingkat yang relatif tinggi dan fluktuatif yaitu pada kisaran 500-700 ribu jiwa, mencerminkan keberlanjutan kekerasan bersenjata meskipun telah di upayakan berbagai perjanjian damai. Bahkan pada periode 2019-2020, korban jiwa masih terus tercatat meskipun dalam jumlah yang lebih rendah, yang menegaskan bahwa konflik di Sudan Selatan tidak bersifat sementara.

### Gambar 1. Konflik di Sudan Selatan dari tahun ke tahun

Sumber: (World Bank, 2022)

nyawa ribuan warga sipil, tetapi juga menghancurkan fondasi kemanusiaan dan tatanan sosial masyarakatnya (Danella, 2025).

Karakter konflik yang berlarut-larut tersebut dapat ditelusuri secara empiris melalui Gambar 1.1, yang menyajikan grafik statistik jumlah korban jiwa akibat konflik bersenjata dari tahun ke tahun. Berdasarkan data *World Bank* (2022), sejak periode awal pascakemerdekaan 2011-2012, Sudan Selatan telah mencatat adanya korban jiwa dalam jumlah signifikan, yang menunjukkan bahwa ketidakstabilan keamanan sudah hadir sejak fase awal pembentukan negara. Eskalasi konflik bersenjata yang terjadi pada 2013-2014 kemudian memicu peningkatan korban jiwa

Berdasarkan durasi konflik dan data korban jiwa yang telah dipaparkan, konflik di Sudan Selatan dapat dipahami sebagai salah satu konflik bersenjata di kawasan Afrika dengan tingkat keberlanjutan kekerasan yang relatif tinggi. Dibandingkan dengan sejumlah negara seperti Republik Afrika Tengah, Uganda, Kenya, dan Republik Demokratik Kongo yang juga mengalami konflik internal dan krisis kemanusiaan, konflik di Sudan Selatan menunjukkan pola kekerasan yang berlangsung dalam jangka panjang dan mencakup wilayah yang luas (Small Arms Survey, 2022). Kekerasan bersenjata yang terjadi sejak awal kemerdekaan serta keterbatasan keberhasilan upaya perdamaian menghambat terbentuknya fase pemulihan pascakonflik. Dalam konteks ini, konflik di Sudan Selatan cenderung berkembang sebagai kondisi yang bersifat struktural, yang secara berkelanjutan memengaruhi tingkat keamanan masyarakat sipil.

Kondisi konflik yang berkepanjangan tersebut menjadikan masyarakat sipil menjadi korban utama dari konflik yang tak kunjung berakhir, ditandai dengan meningkatnya

jumlah pengungsi, kehancuran infrastruktur, serta lumpuhnya aktivitas ekonomi. Ketidakmampuan negara untuk menjamin keamanan dan pemenuhan kebutuhan dasar membuat kehidupan sehari-hari masyarakat berada dalam bayang-bayang ancaman, bahkan di luar zona pertempuran aktif. Konflik yang seharusnya bersifat temporer justru berubah menjadi kondisi permanen yang membentuk realitas sosial masyarakat.

Dalam situasi ketidakamanan yang terus berulang sebagaimana tercermin dalam tingginya jumlah korban jiwa sipil, perempuan menempati posisi yang paling rentan di antara kelompok masyarakat sipil lainnya. Berbagai Laporan lembaga internasional konsisten menunjukkan bahwa keamanan perempuan di Sudan Selatan berada dalam krisis. Kekerasan seksual termasuk, pemerkosaan yang dilakukan secara sistematis oleh kelompok bersenjata, telah menjadi senjata perang dan taktik

**Gambar 2. Laporan Kasus GBV per-kuarter tahun 2015**

Sumber: (Legal Action Worldwide, 2016)

dominasi (Maria, 2023).

Tingginya tingkat kerentanan tersebut tercermin dalam data pemantauan kekerasan berbasis gender tahun 2015, yang menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling dominan sebagai korban berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan fisik dan kekerasan seksual tercatat sebagai bentuk kekerasan yang paling menonjol, diikuti oleh bentuk kekerasan lain seperti pemaksaan perkawinan dan

kekerasan psikososial. Kerentanan ini tidak hanya disebabkan oleh posisi mereka yang umumnya berada di luar struktur politik dan militer, tetapi juga karena norma-norma sosial yang patriarkal turut memperburuk kondisi perempuan, menjadikan mereka lebih mudah menjadi sasaran kekerasan dan eksploitasi selama konflik berlangsung.

Fokus perhatian media dan kebijakan terhadap perempuan dalam konflik cenderung didominasi oleh isu Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG). Meskipun kekerasan seksual merupakan dampak nyata terhadap keamanan personal perempuan, lensa tunggal ini seringkali mengabaikan bahwa *protracted conflict* secara sistemik merusak seluruh jaringan keamanan yang mendukung kelangsungan hidup dan martabat perempuan. Dampaknya jauh lebih luas dari sekadar soal Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) yang mengancam keamanan pribadi perempuan. Kekerasan yang terus-menerus dan sistematis ini benar-benar menghancurkan berbagai aspek keamanan lain yang penting untuk perempuan seperti ketidakpastian ekonomi, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, serta diskriminasi bidang sosial hingga politik.

Penelitian ini menggunakan empat literatur utama sebagai landasan. Pertama, karya milik Maria Fryna Angelica Andris dan Edwin Martua Bangun Tambunan (2023) yang menyoroti terpinggirkannya suara perempuan dalam dinamika konflik. Kedua, karya milik Syifa Alyaa Hasna (2024) menekankan bahwa konflik bersenjata memperburuk kerentanan perempuan terhadap kekerasan berbasis gender, termasuk eksploitasi di kamp pengungsian. Ketiga, karya milik Sugianto Aura Febriyanti (2024) menegaskan bahwa konflik berkepanjangan di Sudan Selatan menjadikan perempuan kelompok paling terdampak,

sekaligus menekankan keterbatasan penagkuan dan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian meskipun mereka berperan penting dalam upaya keamanan dan pembangunan pasca konflik. Terakhir, keempat karya milik Hastanto Akira Danella dan Anggraheni Palupi (2025) menekankan bahwa konflik bersenjata mendorong kekerasan berbasis gender yang sistematis terhadap perempuan akibat budaya patriarki dan lemahnya perlindungan hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yakni terkait dampak *protracted conflict* terhadap keamanan perempuan di Sudan Selatan dari perspektif keamanan manusia.

Selanjutnya untuk menemui jawaban penelitian, tulisan ini menggunakan konsep keamanan manusia (Human Security) dan Gender Based-Violence. Konsep keamanan manusia muncul dari perubahan pemahaman keamanan pasca-Perang Dingin, yang sebelumnya bersifat *state centric* dan berorientasi pada ancaman militer, menjadi *people-centred* dengan fokus pada perlindungan individu (Fadlina, 2023). Melalui *Human Development Report* (UNDP) tahun 1994, keamanan manusia dipahami sebagai upaya melindungi manusia dari berbagai ancaman non-militer yang memengaruhi keselamatan fisik, psikologis, martabat, dan kesejahteraan, serta bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Tujuh dimensi keamanan manusia seperti, ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik, menjadi kerangka untuk melihat bagaimana konflik berkepanjangan di Sudan Selatan menciptakan kerentanan yang berlapis bagi perempuan.

Konsep *Gender Based-Violence* merupakan permasalahan global yang kompleks dan berakar dalam ketimpangan struktur sosial antara laki-laki dan perempuan. Secara umum,

kekerasan berbasis gender mengacu pada berbagai tindakan kekerasan yang ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu berdasarkan identitas gender mereka. Bentuk kekerasan ini meliputi kekerasan fisik, seksual, psikologis, serta ekonomi, yang secara tidak seimbang lebih banyak dialami oleh perempuan dan anak perempuan (UNHCR, 2022). Perempuan seringkali mengalami berbagai bentuk kekerasan baik dari aparat keamanan, kelompok bersenjata, maupun masyarakat sekitar, yang tidak hanya berupa kekerasan fisik dan seksual, tetapi juga eksploitasi, pernikahan dini, serta pembatasan akses terhadap layanan kesehatan. Selain itu, konsep ini juga menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan akibat langsung dari sistem sosial patriarkal, di mana laki-laki memegang kendali lebih besar atas sumber daya, kekuasaan, dan pengambilan keputusan.

Maka dari itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dampak *protracted conflict* di Sudan Selatan terhadap keamanan perempuan.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, yang diperoleh melalui penelaahan terhadap jurnal-jurnal, buku, artikel berita, *e-journal* dan bahan bacaan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan *internet-based*. Penulis menyasar individu yaitu perempuan sebagai unit yang diteliti, dengan fokus pada dampak *protracted conflict* di Sudan Selatan terhadap keamanan perempuan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknis analisis data dari Miles, Huberman dan Saldana yang terdiri dari, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sudan Selatan merupakan negara hasil pemisahan dari Sudan dengan luas wilayah sekitar 644.329 km<sup>2</sup>. Sudan Selatan ini menjadikan Juba sebagai ibu kota sekaligus pusat pemerintahan. Namun, Jonglei menjadi kota dengan penduduk terpadat dan kota terbesar bagi perkembangan ekonomi Sudan Selatan. Secara geografis, Sudan Selatan terletak di kawasan Afrika Timur dan dihuni oleh masyarakat yang sangat beragam dari sisi etnis, agama, dan budaya (Hasna, 2024). Keberagaman ini hidup berdampingan dengan kekayaan sumber daya alam, terutama minyak bumi yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Namun, ketergantungan pada sektor sumber daya alam juga menciptakan ketimpangan distribusi ekonomi dan memperbesar potensi konflik, terutama ketika negara belum memiliki tata kelola yang kuat. Kondisi konflik di Sudan Selatan tidak dapat dilepaskan dari warisan kebijakan kolonial Inggris yang sejak awal menerapkan segregasi administratif antara wilayah utara dan selatan. Kebijakan tersebut didasarkan pada perbedaan etnis, agama, dan budaya, yang secara tidak langsung membentuk ketimpangan akses terhadap kekuasaan politik dan sumber daya. Warisan kolonial ini meninggalkan struktur sosial dan politik yang terfragmentasi dan rentan terhadap konflik pascakolonial. Ketimpangan struktural tersebut kemudian memicu konflik bersenjata yang terinstitusionalisasi dalam dua perang saudara utama, yaitu perang saudara pertama (1955–1972) dan perang saudara kedua (1983–2005). Konflik ini dipicu oleh marginalisasi politik wilayah selatan, pencabutan status otonomi, serta kebijakan sentralisasi kekuasaan oleh pemerintah Sudan di Khartoum (Hasna, 2024).

Melalui Comprehensive Peace Agreement (2005), masyarakat Sudan Selatan memperoleh kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri melalui referendum kemerdekaan pada tahun 2011 (Danella, 2025). Hasil referendum yang menunjukkan dukungan sebesar 99,57 persen mencerminkan kuatnya aspirasi politik masyarakat Sudan Selatan untuk melepaskan diri dari struktur negara Sudan dan membentuk negara berdaulat yang mandiri (Syifa, 2024). Namun, kemerdekaan tidak serta-merta membawa stabilitas. Pasca-kemerdekaan, Sudan Selatan justru kembali dilanda konflik internal yang berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Persaingan kekuasaan antara Presiden Salva Kiir dan Riek Machar tidak hanya memicu krisis politik, tetapi juga bertransformasi menjadi konflik bersenjata yang melibatkan kelompok etnis Dinka dan Nuer (Hastanto, 2024). Dinamika ini memperkuat karakter konflik sebagai *protracted conflict*, ditandai oleh siklus kekerasan yang berulang, kegagalan perjanjian damai, dan lemahnya kapasitas negara dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap masyarakat sipil (Danella, 2025). Dalam kondisi ini, perempuan menjadi salah satu kelompok paling rentan, dengan meningkatnya dampak terhadap keamanan personal, sosial, dan ekonomi, termasuk kekerasan berbasis gender yang terjadi secara sistematis dalam konteks konflik. Karena konflik berlangsung dalam jangka panjang, kerentanan perempuan pun menjadi berlapis dan berkelanjutan.

### **Dampak *Protracted Conflict* terhadap Keamanan Perempuan**

#### **Keamanan Komunitas**

Konflik bersenjata yang berkepanjangan di Sudan Selatan memberikan dampak yang bersifat struktural terhadap tatanan sosial masyarakat. Dalam perspektif keamanan manusia, dampak konflik tersebut tidak muncul secara terisolasi pada tingkat individu, melainkan pertama-tama memengaruhi komunitas sebagai ruang sosial utama tempat relasi, norma, dan mekanisme perlindungan kolektif dibentuk dan dijalankan. Bagi perempuan, komunitas memiliki peran yang sangat sentral karena menjadi arena utama di mana keamanan, identitas sosial, dan akses terhadap dukungan sosial dikonstruksikan. Oleh karena itu, keruntuhan keamanan komunitas menjadi titik awal untuk memahami kerentanan perempuan dalam konteks konflik berkepanjangan di Sudan Selatan. Keamanan komunitas perempuan di Sudan Selatan mengalami keruntuhan struktural akibat konflik berkepanjangan (OCHA, 2020)..

Kekerasan, perpindahan paksa, dan militerisasi telah menghancurkan ikatan keluarga, jaringan sosial, serta mekanisme adat yang sebelumnya berfungsi sebagai perlindungan komunal. Perpecahan komunitas memutus jaringan dukungan penting, memaksa perempuan mengungsi dan terpisah dari sumber perlindungan sosial, sehingga mereka kehilangan mekanisme informal yang selama ini menahan kekerasan dan eksploitasi. Hilangnya jaringan komunal ini meningkatkan kerentanan perempuan terhadap penyerangan, penculikan, dan kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan oleh pasukan pemerintah, serta membatasi mobilitas mereka dalam mengakses ruang publik seperti pasar dan sumber air (UNMISS, 2021). Konflik juga memperparah kekerasan antar-komunitas berbasis etnis, di mana perempuan kerap dijadikan sasaran kekerasan seksual terencana sebagai strategi teror untuk melemahkan komunitas secara

keseluruhan, sebagaimana didokumentasikan oleh Human Rights Watch (2021).

### **Keamanan Personal**

Runtuhnya keamanan komunitas di Sudan Selatan menempatkan perempuan pada risiko ancaman langsung terhadap keselamatan individu. Perang yang tidak kunjung selesai menciptakan situasi di mana tubuh perempuan menjadi ruang paling terekspos terhadap risiko, baik dari kekerasan langsung maupun dari kondisi struktural yang menghancurkan ketahanan fisik mereka. Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya menjadi korban pasif, tetapi berada di garis depan penderitaan fisik yang terus-menerus akibat runtuhnya sistem keamanan, sosial, dan kesehatan di negara tersebut. Meskipun tidak terlibat langsung dalam pertempuran bersenjata, perempuan memiliki potensi besar untuk menanggung konsekuensi paling berat, yaitu seperti maraknya praktik pemerkosaan massal, mutilasi, kekerasan seksual yang disertai penyiksaan, penculikan, perbudakan seksual serta kekerasan berbasis gender lainnya yang dilakukan secara sistematis oleh kelompok bersenjata (Lambe, 2022).

Kekerasan ini menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang, seperti luka permanen, kerusakan organ reproduksi, fistula obstetri, serta risiko penyakit menular seksual (PBB, 2023). Data *International Rescue Committee* menunjukkan sekitar 65 persen perempuan Sudan Selatan pernah mengalami kekerasan seksual atau fisik. Dalam situasi konflik, ketika perempuan harus tetap bertahan hidup seperti mengurus anak, mencari makanan, atau mengungsi dari satu tempat ke tempat lain, kondisi fisik yang melemah ini mendorong mereka ke titik rentan yang lebih dalam.

### **Keamanan Ekonomi**

Ancaman yang terus menerus terhadap keselamatan pribadi perempuan di Sudan Selatan mengurangi kemampuan mereka untuk bergerak bebas dan mengakses sumber penghidupan, yang pada gilirannya menempatkan keamanan ekonomi mereka dalam risiko tinggi. Mayoritas perempuan yang bekerja di sektor pertanian harus kehilangan akses terhadap lahan, ternak, pasar, dan jaringan ekonomi akibat kerusakan infrastruktur, perampasan aset, serta pengungsian massal (PBB, 2023).

**Gambar 3. Kondisi perempuan di Sudan Selatan harus menanggung beban ganda, yakni sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh keluarga**  
Sumber: (Institute, 2025)

Perpindahan ke kamp pengungsian tidak memperbaiki kondisi tersebut, karena terbatasnya kesempatan kerja produktif dan tingginya ketergantungan pada bantuan kemanusiaan yang tidak stabil. Upaya perempuan untuk mencari penghasilan di luar kamp justru meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender, sementara lingkungan kamp sendiri tidak sepenuhnya aman akibat diskriminasi dan intimidasi (Maria, 2023). Kondisi ini diperparah oleh sistem patriarki yang membatasi kontrol perempuan atas sumber daya dan keputusan ekonomi, sehingga ketika konflik terjadi perempuan menjadi kelompok yang paling cepat kehilangan penghidupan dan dipaksa menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh keluarga karena mengingat banyak

laki-laki terlibat langsung dalam pertempuran atau menjadi korban kekerasan bersenjata (MercyCorps, 2019).

### **Keamanan Pangan**

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan bagi keluarga, perempuan merasakan tekanan langsung ketika produksi pangan terganggu. Lahan-lahan yang menjadi sumber utama pangan dan pendapatan perempuan kerap ditinggalkan akibat serangan, pembakaran desa, dan pengungsian paksa, sehingga menghentikan kegiatan pertanian dan melemahkan ketahanan ekonomi rumah tangga (Global, 2025). Kondisi ini diperparah oleh rusaknya pasar lokal, terganggunya rantai pasokan, serta lonjakan harga pangan hingga 50 persen, yang semakin membatasi akses perempuan terhadap bahan makanan, terutama di wilayah pedesaan.

**Gambar 4. Ketahanan pangan rapuh di bawah bayang konflik dan banjir**  
Sumber: (Aid, 2017)

Tekanan konflik tersebut diperburuk oleh banjir tahunan yang menghilangkan sumber penghidupan dan mengganggu produksi pangan. Laporan IPC mencatat sekitar 76 persen perempuan dan anak perempuan di Sudan Selatan berisiko mengalami kelaparan ekstrem (IPC, 2024). Tekanan pangan yang berkepanjangan mendorong perempuan pada strategi bertahan hidup berbahaya, seperti



pernikahan dini, barter seks, dan perdagangan manusia, di mana tubuh perempuan menjadi alat tukar dalam kondisi ketimpangan struktural. Diperkirakan sekitar 50 persen anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, dengan peningkatan signifikan selama masa krisis ekonomi dan konflik (Internasional, n.d). Dalam kondisi ekstrem, sebagian perempuan bahkan terjebak dalam barter seks atau perdagangan manusia sebagai bentuk terakhir untuk memperoleh makanan

### Keamanan Kesehatan

Tekanan yang terus-menerus dari konflik, kekerasan, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya sehari-hari menempatkan perempuan dalam kondisi rentan yang secara signifikan menghambat akses mereka terhadap layanan dasar, termasuk layanan reproduksi seperti pemeriksaan kehamilan, bantuan persalinan, dan perawatan pasca-persalinan. Banyak fasilitas kesehatan yang hancur atau tidak berfungsi akibat konflik, sementara tenaga medis dan obat-obatan sangat terbatas. *United Women* (2024) mencatat bahwa sekitar 1,63 juta perempuan usia subur tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan memadai, kerentanan ini semakin diperburuk oleh minimnya air bersih, sanitasi, dan fasilitas kebersihan yang aman serta terjangkau, sehingga perempuan menjadi kelompok yang mengalami dampak paling tidak proporsional (*United Women*, 2024). Di tengah kondisi tersebut, meningkatnya kekerasan seksual selama konflik turut menambah lapisan kerentanan, karena menyebabkan trauma psikologis mendalam, penyakit menular seksual, kehamilan tidak diinginkan, dan komplikasi yang meningkatkan angka kematian maternal. Kelaparan yang meluas akibat krisis pangan juga menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang melemahkan kondisi perempuan.

Tubuh yang kekurangan gizi menjadi lebih rentan terhadap penyakit berbahaya, sementara

### Gambar 5. Kondisi perempuan di Sudan Selatan yang terbaring lemas, potret nyata konflik berkepanjangan yang merampas hak mereka atas kesehatan

Sumber: (Aid, 2017)

kemampuan fisik untuk bekerja, mencari makanan, dan menjaga keluarga tetap aman semakin berkurang (*MerryCorps*, 2019). UNICEF memperkirakan jutaan perempuan di Sudan Selatan hidup dalam kondisi malnutrisi akut, yang tidak hanya melemahkan daya tahan tubuh mereka, tetapi juga memperbesar kemungkinan terjangkit penyakit menular (*MerryCorps*, 2019). Situasi ini paling terasa di kamp-kamp pengungsian, di mana perempuan mendominasi jumlah penduduknya, hidup dalam keterbatasan pangan, lingkungan yang padat, serta sanitasi yang buruk. Akibatnya, wabah penyakit menular seperti kolera, malaria, dan infeksi saluran pernapasan mudah merebak dan sulit dikendalikan. Perempuan, yang umumnya bertanggung jawab mengurus keluarga, lebih rentan terpapar karena intensitas kontak langsung dengan anak-anak dan lingkungan sekitar.

### Keamanan Lingkungan

Ketidakstabilan yang berlarut-larut menghancurkan infrastruktur dasar, merusak ruang sosial, serta menghilangkan batas-batas

aman yang sebelumnya melindungi perempuan dalam aktivitas sehari-hari. Konflik yang terlalu prolong ini menyebabkan banyak wilayah yang dulunya menjadi bagian dari rutinitas perempuan berubah menjadi zona berbahaya karena kehadiran kelompok bersenjata, ranjau darat, maupun potensi serangan mendadak. Akibatnya, perempuan yang harus keluar rumah atau kamp pengungsian untuk memenuhi kebutuhan dasar dihadapkan pada risiko kekerasan fisik, pelecehan, hingga kekerasan seksual (Women, 2024). Beban ini semakin berat karena perempuan memikul tanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup rumah tangga. Setiap hari, mereka dipaksa berjalan semakin jauh melewati wilayah yang tergenang banjir untuk mencari kayu bakar, baik untuk memasak maupun dijual demi memperoleh penghasilan tambahan (OCHA, 2022).

Aktivitas ini menghabiskan lebih dari lima

**Gambar 6. Perempuan di pengungsian mengumpulkan kayu bakar agar bisa memasak untuk keluarganya**

Sumber: (MerryCorps, 2019)

jam setiap harinya, sehingga menyisakan tenaga yang minim untuk kebutuhan lain. Kerusakan ekosistem akibat pertempuran, pembakaran lahan, dan pengungsian massal turut mempersempit akses terhadap sumber daya alam. Banyak sumber air dan area pengumpulan kayu bakar yang sebelumnya aman kini berubah menjadi wilayah berbahaya atau bahkan tidak dapat digunakan setelah mengalami

kontaminasi, pendangkalan, atau pengeringan (PBB, 2023). Dalam banyak kasus, perempuan harus berjalan berkilo-kilometer menuju lokasi yang lebih terpencil karena sumber daya di sekitar permukiman telah habis atau rusak. Kondisi ini tidak hanya memperbesar beban fisik, tetapi juga menambah risiko karena semakin jauh perempuan melangkah, semakin minim pula pengawasan komunitas dan semakin besar kemungkinan mereka menghadapi kelompok bersenjata atau pelaku kriminal hutan.

Pencemaran sumber air bersih menjadi salah satu dampak paling signifikan terhadap perempuan. Runtuhnya infrastruktur air dan sanitasi menyebabkan air yang dikonsumsi dan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga terkontaminasi, sehingga meningkatkan risiko penyakit seperti diare, infeksi kulit, dan kondisi kesehatan lainnya, yang lebih berbahaya bagi perempuan yang sudah mengalami kekurangan gizi dan kelelahan fisik akibat beban kerja berlebih. Risiko ini semakin besar bagi perempuan karena mereka bertanggung jawab atas penggunaan air dalam pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci, dan merawat anak.

### **Keamanan Politik**

Di tengah kondisi negara yang terus berada dalam bayang-bayang kekerasan sejak kemerdekaan, politik menjadi arena yang hanya dapat diakses oleh kelompok yang memiliki kekuatan koersif. Perempuan tidak hanya menghadapi hambatan struktural akibat konflik, tetapi juga berlapis dengan norma patriarki yang telah lama mengakar. Hal ini membuat mereka sulit untuk menempati posisi strategis dalam lembaga negara maupun dalam proses negosiasi damai. Salah satu konsekuensi paling signifikan dari *protracted conflict* ini adalah menurunnya kebebasan perempuan dalam menyuarakan pendapat politik.

Aktivistis perempuan, negosiator, dan anggota organisasi masyarakat sipil kerap menghadapi intimidasi, pelecehan, serta

**Gambar 7. Perempuan Sudan Selatan demonstrasi damai menuntut semua pihak yang berperang agar mengakhiri konflik**

Sumber: (AntaraSumber, 2018)

pengawasan dari kelompok bersenjata (Amnesty International, 2022). Aktivitas politik perempuan dianggap sebagai ancaman terhadap struktur kekuasaan maskulin yang dibangun dari legitimasi militer. Ancaman tersebut menciptakan efek jera yang membungkam suara perempuan dan membatasi keterlibatan mereka dalam diskusi strategis mengenai masa depan negara. Selain intimidasi, perempuan juga mengalami hambatan fisik yang menghalangi akses ke ruang-ruang politik. Pertemuan penting sering diselenggarakan di wilayah yang tidak aman atau berada di bawah kontrol kelompok bersenjata tertentu. Mobilitas perempuan terhambat oleh risiko kekerasan seksual, penculikan, dan serangan fisik, yang membuat mereka menarik diri dari proses politik. Perempuan, meskipun aktif di tingkat akar rumput melalui advokasi kemanusiaan, mediasi komunitas, dan aksi perdamaian, tetap dipandang tidak memiliki legitimasi politik karena tidak terlibat dalam kekerasan bersenjata. Partai-partai politik yang didominasi oleh budaya patriarki di Sudan Selatan memanfaatkan norma sosial konservatif untuk

menolak keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan. Hal ini membuat perempuan tersisih dari posisi strategis dalam politik, sehingga partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan menjadi terbatas (PBB, 2023). Eksklusi semacam ini bukan hanya mereduksi kontribusi perempuan dalam upaya membangun tatanan masyarakat yang lebih stabil dan adil, tetapi juga menjadi hambatan serius bagi pemenuhan hak-hak politik mereka sebagai warga negara yang setara.

Apabila ditelaah secara menyeluruh, ketujuh dimensi dampak tersebut menunjukkan pola kerentanan yang saling berkelindan. Kekerasan fisik, ketidakamanan personal, dan keterpurukan ekonomi membentuk mata rantai penderitaan perempuan yang diperparah oleh kegagalan negara dalam menjamin perlindungan dan keamanan. Kondisi ini menegaskan bahwa ancaman terhadap perempuan dalam konflik bersenjata tidak hanya merupakan dampak langsung perang, tetapi juga cerminan lemahnya struktur sosial dan politik negara dalam melindungi hak dan keselamatan perempuan.

## PENUTUP

Sejak merdeka pada 2011, konflik berkepanjangan di Sudan Selatan telah menciptakan ketidakamanan multidimensional bagi masyarakat sipil, terutama perempuan. Perempuan menghadapi kerentanan berlapis melalui kekerasan berbasis gender seperti eksploitasi seksual, perdagangan perempuan, dan pernikahan paksa, yang berdampak tidak hanya secara fisik tetapi juga mengikis akses terhadap layanan kesehatan, mata pencaharian, serta partisipasi sosial dan politik. Dalam perspektif *human security*, konflik ini merusak seluruh dimensi keamanan perempuan, mulai dari melemahnya perlindungan komunal akibat fragmentasi sosial dan pengungsian massal, penggunaan kekerasan fisik dan seksual sebagai

strategi perang yang menimbulkan trauma jangka panjang, hingga kehancuran ekonomi dan krisis pangan yang memaksa perempuan menanggung beban ganda serta menempuh strategi bertahan hidup berisiko. Keterbatasan layanan kesehatan, kerusakan lingkungan, serta instabilitas politik dan dominasi patriarki semakin mempersempit ruang perlindungan dan partisipasi perempuan. Secara keseluruhan, konflik di Sudan Selatan mencerminkan krisis kemanusiaan multidimensi yang menempatkan perempuan dalam posisi marginal secara sosial, ekonomi, dan politik, meskipun penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena bergantung pada data sekunder dari laporan lembaga internasional dan organisasi kemanusiaan, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan pengalaman langsung perempuan korban konflik di Sudan Selatan..

## Daftar Pustaka

- Aid, C. (2017). Retrieved from <https://mediacentre.christianaid.org.uk/southsudan/hunger/crisis/>
- Angelika, R. F. D. (2022). Peace Agreement Implementation (PAI): What Matters? A Review of the Literature. *Department of Political Science and Center for International Studies. Faculty of Social Sciences, University of the Andes.*
- AntaraSumber. (2018). *Perempuan Sudan selatan demonstrasi tuntutan pemimpin akhiri konflik.* Retrieved from <https://sumbar.antaranews.com/berita/229237/perempuan-sudan-selatan-demonstrasi-tuntut-pemimpin-akhiri-konflik>
- BBC. (2011). Retrieved from BBC News Indonesia: [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/01/110130\\_referendumsudan](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/01/110130_referendumsudan)
- Dellina, H.A., & Anggraheni, P. (2025). Action For Peacekeeping Sexual And Gender Based On Violence United Nations Mission In South Sudan. *Undergraduate*
- Diani, N. (2023). Keamanan Manusia Di Afghanistan Pascaperubahan Standing Rules Of Engagement Pasukan Amerika Serikat, 2018-2021. *Skripsi.*
- Diaz, P. C. (2012). *Women's Participation in Peace Negotiations: Connections between presence and influence.* Retrieved from UN Women: [https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2012/10/WPSourcebook-03A-WomenPeaceNegotiations-en.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2012/10/WPSourcebook-03A-WomenPeaceNegotiations-en.pdf?utm_source=chatgpt.com)
- Global, T. (2025). *Demi Alasan Kemanusiaan, PBB Minta Pihak Bertikai di Sudan Hentikan Konflik.* Retrieved from Liputan6: [https://www.liputan6.com/global/read/6125547/demi-alasan-kemanusiaan-pbb-minta-pihak-bertikai-di-sudan-hentikan-konflik?utm\\_source=chatgpt.com&page=3%20krawanan%20pangan](https://www.liputan6.com/global/read/6125547/demi-alasan-kemanusiaan-pbb-minta-pihak-bertikai-di-sudan-hentikan-konflik?utm_source=chatgpt.com&page=3%20krawanan%20pangan)
- Hasna, S. A. (2024). Perang Saudara Sudan Selatan dan Gender-Based Violence (GBV) di Malakal Protection of Civilians (PoC). Retrieved from <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/24209/3/BAB%20II.pdf>
- Institute, M. E. (2025). *Two years on, Sudan's war seems further than ever from resolution. Can US involvement help peace efforts?* Retrieved from <https://www.mei.edu/publications/two-years-sudans-war-seems-further-ever-resolution-can-us-involvement-help-peace>
- Internnasional, P. (n.d.). *Bagaimana krisis pangan di Sudan Selatan memengaruhi kehidupan anak perempuan?* Retrieved from Situs Web Global: <https://plan-international.org/emergencies/how-food-crisis-south-sudan-affecting-girls-lives/#:~:text=Krisis%20pangan%20berdampak%20pada%20kesehatan,guruku%20dan%20teman%20temanku.%E2%80%9D>

- Lame, A. I. (2022). Peran Un Action Against Sexual Violence In Conflict Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Somalia. *skripsii*.
- Maria, F. A. A., & Edwin, M. B. T. (2023). Peran Perempuan Dalam Proses Bina Damai: Studi Kasus Aktivis Perempuan Di Sudan Selatan (2005-2018).
- MercyCorps. (2019). *Fakta: Apa yang perlu Anda ketahui tentang krisis Sudan Selatan*. Retrieved from <https://www.mercycorps.org/blog/south-sudan-crisis#crisis-south-sudan-start>
- PBB, K. (2023). *Sudan Selatan: "Hidup sebagai perempuan adalah perjuangan yang kita lalui setiap hari*. Retrieved from OCHA: <https://unocha.exposure.co/south-sudan-living-as-a-woman-is-a-fight-we-go-through-daily>
- Repository, u. (nd). BAB III Dinamika Konflik Bersenjata Dan Bentuk Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Di Sudan Selatan. Retrieved from <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28048/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>
- Sugianto, A. F. (2024). Peran Perempuan Sudan Selatan Dalam Memperkuat Perdamaian Dan Keamanan Pasca Kemerdekaan Sebagai Implementasi Revolusi Dewan Keamanan PBB 1325 Tahun 2013-2023.
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2023). *Sudan humanitarian bulletin: Issue 15, January 2023*. <https://www.unocha.org/sudan/reports/sudan-humanitarian-bulletin-issue-15-january-2023>
- United Nations Mission in South Sudan. (2021). *Human rights report: January-June 2021*. <https://unmiss.unmissions.org/human-rights-report-january-june-2021>
- RadioFreeEurope. (2011). *South Sudan Becomes 193rd UN Member*. Retrieved from [https://www.rferl.org/a/south\\_sudan\\_becomes\\_193rd\\_un\\_member/24265934.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.rferl.org/a/south_sudan_becomes_193rd_un_member/24265934.html?utm_source=chatgpt.com)
- Reliefweb. (2023). *Perempuan di Garis Depan: Perspektif Feminis tentang Krisis yang Berkelanjutan di Sudan*. Retrieved from <https://reliefweb.int/report/sudan/women-frontlines-feminist-perspective-ongoing-crisis-sudan>
- Small Arms Survey. (2022). *The longest war: The enduring conflict in South Sudan*. Graduate Institute of International and Development Studies. <https://www.smallarmssurvey.org/>
- UNICEF. (2021). *Gender Based Violence*. Retrieved from <https://www.unicef.org/southsudan/topics/gender-based-violence#:~:text=Membuat%20yang%20kuat%20menjadi%20lebih,hak%20asasi%20manusia%20dasar.>
- UNICEF. (2025). *Konflik, pengungsian, dan penyakit menyebabkan kerawanan pangan dan malnutrisi mencapai tingkat yang mengkhawatirkan di beberapa wilayah Sudan Selatan*. Retrieved from <https://www.unicef.org/press-releases/conflict-displacement-and-disease-drive-food-insecurity-and-malnutrition-alarming>
- UN Women. (2022). *Women, peace and security annual report 2022*. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/10/women-peace-and-security-annual-report-2022>
- Vision, W. (2022). *Pernikahan Anak dan Krisis Kelaparan di Sudan Selatan: Sebuah Studi Kasus*. Retrieved from *Pernikahan Anak dan Krisis Kelaparan di Sudan Selatan: Sebuah Studi Kasus*
- Watch, H. R. (2016). *Sudan Selatan: Pembunuhan, Pemerkosaan, dan Penjarahan di Juba Embargo Senjata, Sanksi PBB Tambahan Diperlukan*.

Retrieved from  
<https://www.hrw.org/news/2016/08/15/south-sudan-killings-rapes-looting-juba>